



LAPORAN RPKP PELAKSANAAN PEKERJAAN



PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI WILAYAH II KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT



KAWASAN PERDESAAN BERBASIS PARIWISATA ALAM DAN BUDAYA KECAMATAN CIWARU

**LEMBAGA PELATIHAN, PENERAPAN ILMU DAN TEKNOLOGI (LP2IT)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2016**

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum, Wr.Wb.

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, tim penyusun dapat menyelesaikan Laporan RPKP Pelaksanaan Pekerjaan terkait Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Kuningan. Laporan RPKP Pelaksanaan Pekerjaan ini disusun mengacu pada tujuan, sasaran dan cakupan pekerjaan, serta arahan lainnya yang disebutkan dalam Kerangka Acuan Kerja dan ruang lingkup dalam Kontrak Pekerjaan.

Laporan RPKP Pelaksanaan Pekerjaan ini berisikan Analisis isu-isu strategis, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kawasan Perdesaan, serta Strategi dan Kebijakan.

Demikian laporan ini kami ajukan, tidak lupa kami sampaikan terimakasih dan penghargaan kepada para pihak yang telah membantu. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Kawasan Perdesaan ke depan.

Bandung, November 2016
Ketua LP2IT - UPI

Dr. Leli Yulifar, M.Pd.
NIP. 196412041990012002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
DAFTAR TABEL.....	III
DAFTAR GAMBAR	IV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUJUAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN	3
1.3 LANDASAN HUKUM.....	3
BAB II DESKRIPSI DAN ANALISIS KAWASAN PERDESAAN	5
2.1 DELINIASI DAN PUSAT KAWASAN	6
2.2 FISIK DASAR	11
2.3 SOSIAL BUDAYA DAN KEPENDUDUKAN	13
2.4 EKONOMI	14
2.5 SARANA DAN PRASARANA.....	15
BAB III VISI-MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	17
3.1 VISI DAN MISI	17
3.1.1 Visi.....	17
3.1.2 Misi.....	17
3.2 TUJUAN.....	17
3.3 SASARAN	18
3.4 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	18
3.4.1 Strategi dan Arah Kebijakan Tingkat Nasional.....	17
3.4.2 Strategi dan Arah Kebijakan Tingkat Provinsi.....	25
3.4.3 Strategi dan Arah Kebijakan Tingkat Kabupaten.....	28
3.4.4 Strategi dan Arah Kebijakan Tingkat Kawasan Perdesaan	30
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN.....	37
4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN	37
4.2 INDIKATOR CAPAIAN KEGIATAN	425
4.3 KERANGKA PENDANAAN.....	28
LAMPIRAN.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Angka IPM Tahun 2010 – 2014	13
Tabel II.2 Gambaran Kondisi Pendidikan	14
Tabel II.3 Indikator Makro Ekonomi dan Infrastruktur	14
Tabel II.4 Indikator Keuangan Daerah	15
Tabel II.5 Gambaran Kondisi Infrastruktur.....	16
Tabel III.1 Gambaran Umum Kawasan Perdesaan yang Diusulkan. Error! Bookmark not defined.	
Tabel V.1 Analisis SWOT Penetapan Strategi dan Arah Kebijakan.....	32
Tabel V.2 Strategi dan Arah Kebijakan untuk Masing-Masing Sasaran RPKP.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Kuningan	12
Gambar II.2 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Kuningan	12
Gambar II.4 Peta Kondisi Infrastruktur Kabupaten Kuningan.....	16
Gambar III.1 Delineasi Kawasan Perdesaan Ciwaru, Kabupaten Kuningan.....	Error!
Bookmark not defined.	
Gambar III.2 Potensi Pariwisata Kawasan Perdesaan yang Diusulkan	Error!
Bookmark not defined.	
Gambar III.3 Keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesenjangan antar-wilayah masih merupakan tantangan besar dalam pembangunan nasional. Angka-angka resmi pemerintah maupun non pemerintah menunjukkan bahwa dari aspek ekonomi, sosial (kemiskinan), infrastruktur, dan sebagainya merupakan suatu fakta yang menyebabkan terjadinya kesenjangan baik antar wilayah, antar provinsi/kabupaten, bahkan antar kota dan desa. Kesenjangan dari aspek ekonomi misalnya, sangat terlihat dari intensitas kegiatan ekonomi yang masih terpusat di Jawa dan Bali. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, disebutkan bahwa pembangunan desa dan kawasan perdesaan secara komprehensif merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Untuk itu target sasaran yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 adalah mengurangi 5.000 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan sedikit-dikitnya 2.000 desa berkembang menjadi desa mandiri.

Pembangunan kawasan perdesaan merupakan salah satu pendekatan dalam menyelesaikan permasalahan desa dan kawasan perdesaan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 83 UU Nomor 6 tahun 2014, menyebutkan bahwa: Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Lebih lanjut disebutkan bahwa pembangunan kawasan perdesaan meliputi: a). penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota; b). pelayanan yang



dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan; c). pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan d). pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. Untuk melaksanakan amanat ini, maka perlu disusun Rancangan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dibahas bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa. Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, beserta Petunjuk Teknis (Juknis) Pembangunan Kawasan Perdesaan, maka legalitas dan acuan penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan semakin lengkap.

Pemerintah Kabupaten Kuningan, mengusulkan tema Pembangunan Kawasan Perdesaan berbasis Pariwisata Alam dan Budaya di Kecamatan Ciwaru, yang meliputi empat desa, yaitu desa Ciwaru, Sumber Jaya, Citundun, dan Sagaranten. Pemilihan tema Berbasis Pariwisata Alam dan Budaya selain karena besarnya potensi Pariwisata Alam dan Budaya di empat desa tersebut, juga berdasarkan pertimbangan memantapkan keunggulan kawasan agropolitan, pariwisata daerah, sektor unggulan lainnya, peningkatan investasi ramah lingkungan, serta peningkatan sarana dan prasarana daerah, dengan memperhatikan kesesuaian dengan arah pembangunan Kabupaten ke depan, yang tertuang dalam RTRW dan RPJMD.

Pengembangan sektor pariwisata berbasiskan wisata budaya dan alam akan memberikan dampak kemajuan ekonomi yang maksimal dengan resiko lingkungan yang minimal. Sehingga diharapkan pembangunan kawasan perdesaan tersebut dapat menjadi menjadi daya ungkit peningkatan kegiatan pembangunan kawasan, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat desa.

1.2 Tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Tujuan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yaitu untuk :

- 1) Meningkatkan pemahaman Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Terhadap Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- 2) Menyusun rancangan RPKP sebagai bahan masukan bagi TKPK Kabupaten untuk diusulkan kepada Bupati menjadi RPKP yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; dan
- 3) Meningkatkan kapasitas Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan.

1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan berbasis Pariwisata Alam dan Budaya di Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke-dua UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6/2014, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa;

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, sebagaimana telah dirubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke-dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019;
- 10) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- 11) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
- 12) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Nomor 6 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- 13) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016; dan
- 14) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2010, Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025.
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2014, Tentang Perubahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018.
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031.
- 18) Keputusan Bupati Kuningan No. 050/KPTS-451-Bappeda/2016 tentang Kawasan Perdesaan Berbasis Pariwisata Alam dan Budaya Di Kecamatan



Ciwaru, Kecamatan Pasawahan, dan Kecamatan Subang Kabupaten Kuningan.

Keputusan ini meliputi penetapan tim TKPKP Kabupaten Kuningan.



BAB II

DESKRIPSI DAN ANALISIS KAWASAN PERDESAAN

2.1 Deliniasi dan Pusat Kawasan

Kondisi umum Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan berbasis Pariwisata Alam dan Budaya Kabupaten Kuningan, adalah sebagai berikut :

Luas dan Batas Wilayah

Luas Wilayah Desa Citundun 438,234 Ha dengan penggunaan lahan sebagai berikut:

- Sawah : 82.585 Ha
- Tanah Kering : 355.649 Ha
- Tanah Hutan Negara : 115.000 Ha
- Hutan Rakyat : 307.217 Ha
- Penganonan : -
- Pemukiman : 10.085 Ha
- Pemakaman : 6.017 Ha

Batas wilayah Desa Citundun terdiri dari 3 dusun , 4 RW dan 8 RT dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sumberjaya
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sagaranten
- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ciwaru
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cilumping Kec. Dayeuh Luhur Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah

Keadaan wilayah merupakan dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata 300-900 m diatas permukaan laut , dengan curah hujan rata-rata 2000-3000 mm/tahun

Orbitasi (Jarak dari pusat Pemerintahan Desa) sebagai berikut :

Jarak dari Kantor Desa ke Kantor Kecamatan : 6.5 Km



Jarak dari Kantor Desa ke Ibu Kota Kabupaten : 43.5 Km

Jarak dari Kantor Desa ke Ibu Kota Provinsi : 469 Km

Keadaan Penduduk

Menurut Jumlah

Jumlah Penduduk Laki-laki : 1.105 Orang

Jumlah Penduduk Perempuan : 944 Orang

Jumlah Penduduk Pendetang : 6 Orang

Jumlah Penduduk Pindah : 5 Orang

Jumlah Penduduk Lahir : 12 Orang

Jumlah Penduduk Mati : 5 Orang

Jumlah KK : 731 Kepala Keluarga

Pendidikan Penduduk

Usia 3-6 tahun belum masuk TK : 126 Orang

Usia 3-6 tahun sedang TK/PAUD : 60 Orang

Usia 7-8 tidak Pernah Sekolah : -

Usia 7-13 tahun yang sedang sekolah SD :

Laki-laki 81 orang, Perempuan 118 orang

Usia 13-16 tahun yang sekolah SMP :

Laki-laki 55 orang, Perempuan 40 orang

Usia 16-19 tahun sedang sekolah SLTA :

Laki-laki 25 orang, Perempuan 14 orang

Usia 18-56 tidak pernah sekolah : -

Usia 18-56 Pernah sekolah SD tetapi tidak tamat :

30 orang

Tamat SD sederajat : 1420 Orang

Usia 12-56 tidak tamat SD : 47 Orang

Usia 18-56 tidak tamat SLTP : -



Usia 18-56 tidak tamat SLTA : -
Tamat SLTA sederajat : -
Tamat D 1 : 81 Orang
Tamat D 2 : 2 Orang
Tamat D 3 : 3 Orang
Tamat S 1 : 17 Orang
Tamat S 2 : 1 Orang
Tamat S 3 : -

Mata Pencaharian

Menurut mata pencaharian

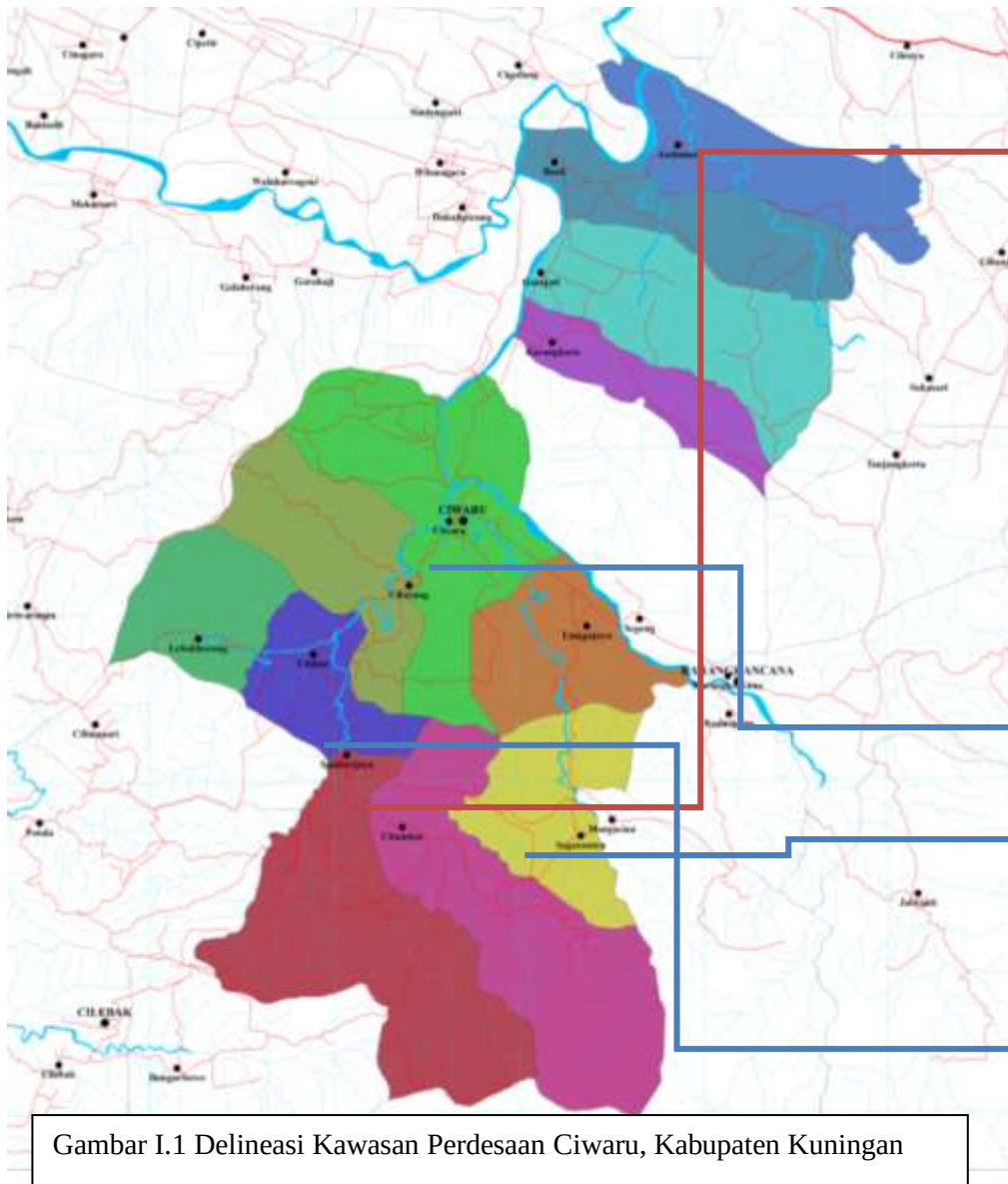
- TNI/Polri : -
- Pegawai Negeri Sipil : 23 orang
- Pensiunan : 9 Orang
- Pegawai swasta : 5 Orang
- Petani buruh tani : 458 KK
- Pedagang : 125 Orang
- Lain-lain : 300 orang
- Jumlah Keluarga Prasejahtera : 337 KK
- Jumlah keluarga sejahtera 1 : 296 KK
- Jumlah keluarga sejahtera 2 : 98 KK
- Jumlah keluarga sejahtera 3 : -
- Jumlah keluarga sejahtera 3 Plus : -
- Total jumlah kepala keluarga : 731 KK
- Jumlah angkat kerja penduduk usia 18-56 tahun: 904 Orang
- Jumlah angkat kerja penduduk usia 18-56 tahun : 904 Orang
- Jumlah Penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja : 393 Orang
- Jumlah Usia 18-56 yang masih bekerja penuh : 23 Orang

- Jumlah Usia 18-56 yang masih bekerja tidak tentu : 1439 Orang
- Jumlah Usia 18-56 yang masih bekerja yang cacat tidak bekerja : 17 Orang
- Jumlah Usia 18-56 yang masih bekerja yang cacat dan bekerja : 5 Orang

Tabel 2.1 Gambaran Umum Kawasan Perdesaan yang Diusulkan

Desa Citundun Sebagai Pusat Kawasan • Luas Wilayah : 4,382 km² • Jumlah Penduduk : 2.038 jiwa • IDM : 0,5404 - Desa Tertinggal • Potensi Wisata : Cadas Gantung, Curug Walet, Curug Cigolo, Curug Balukbuk, Curug Loa, Batu Alam Muka Lawang, temuan Artefak/arca • Komoditas Unggulan : kerajinan tangan bambu dan makanan khas • Sudah terbentuk Kelompok Sadar Wisata BRAPALA • Lahan milik desa 3,5 Ha
Desa Ciwaru, Sagaranten, dan Sumberjaya Sebagai Desa Penunjang • Desa Ciwaru (IDM 0,6566 – Desa Berkembang) : - Sbg pusat Kecamatan Ciwaru - Terdapat perajin kripik singkong, tahu, tempe, oncom dan anyaman bambu • Desa Sagaranten (IDM 0,5914 – Desa Tertinggal) : - Curug Bungawari • Desa Sumberjaya (IDM 0,6090 – Desa Berkembang) : - Curug Winujati - Sumber Air Panas Alami Balandongan

Gambaran lokasi kawasan perdesaan yang diusulkan, berupa peta delineasi empat desa yang termasuk ke dalam kawasan Agroforestry Pariwisata Alam dan Budaya dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut:



- **Pusat Kaw**
- **Desa Citund**
- **Desa Penuh**
- **Desa Ciwaru**
- **Sumberjaya**
- **Potensi De**
- **Objek Wisata**
- **menjadi des**
- **Komoditas**
- 1. **Desa Ciwa**
- tempe, onco
- 2. **Desa Saga**
- tradisional ja
- klontong da
- 3. **Desa Sum**
- aren dan pe

2.2 Fisik Dasar

Kabupaten Kuningan terletak di bagian timur Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah 1.195,7112 Km² terletak pada titik koordinat 108⁰ 23' - 108⁰ 47' Bujur Timur dan 6⁰ 47' - 7⁰12' Lintang Selatan. Batas wilayah Kabupaten Kuningan terdiri atas :

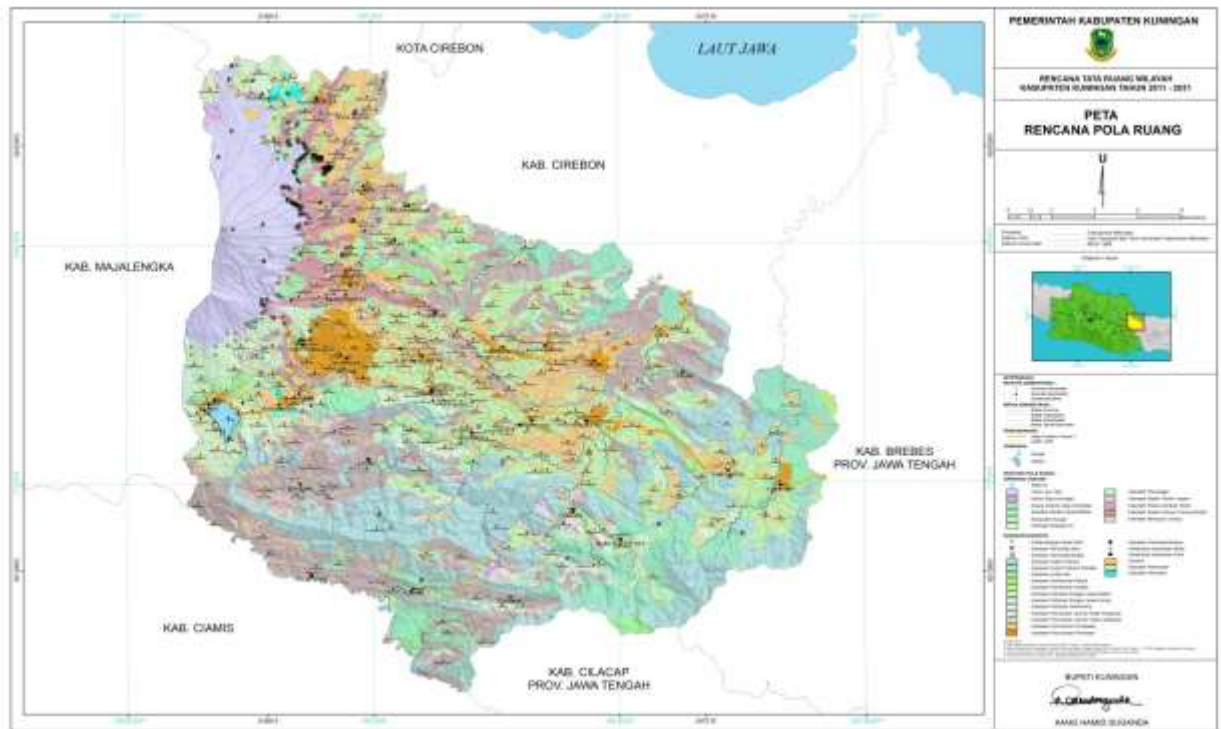
- sebelah utara : Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat
- sebelah timur : Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah
- sebelah selatan : Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
- sebelah barat : Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat

Kondisi topografi di Kabupaten Kuningan sangat bervariasi mulai dari dataran hingga berbukit. Bentang alam Kabupaten Kuningan sebagian besar merupakan perbukitan dan pegunungan dengan puncak tertinggi Gunung Ciremai ($\pm$ 3.078 meter), sedangkan sebagian kecil lainnya merupakan dataran.

Kabupaten Kuningan beriklim tropis dengan temperatur bulanan berkisar 18-32 °C, dengan kelembaban udara 80 % - 90 %. Semakin ke arah barat, suhu udara di Kabupaten Kuningan semakin rendah karena ke arah barat ketinggian permukaan tanahnya semakin tinggi jika dibandingkan dengan permukaan laut.

Sementara itu, curah hujan di Kabupaten Kuningan berkisar antara 1000-5000 mm/th. Wilayah Kabupaten Kuningan secara umum merupakan daerah dengan kondisi hidrologi curah hujan tidak merata sepanjang tahun. Di beberapa wilayah Kabupaten Kuningan mengalami kekeringan atau rawan air bersih, sedangkan di sekitar Gunung Ciremai, curah hujan tahunan dapat mencapai 5000 mm/tahun (IWACO-WASECO, 1990).





Sumber: RTRW Kab. Kuningan

Gambar 2.2 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Kuningan



Gambar 2.3 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Kuningan

2.3 Sosial Budaya dan Kependudukan

Indikator kondisi sosial Kabupaten Kuningan dapat dilihat pada tabel Indeks Pembangunan Manusia berikut:

Tabel 2.2 Indikator Makro Sosial Kab. Kuningan 2013 – 2015

Indikator Makro Pembangunan Kab. Kuningan				
NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2013	2014	2015
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	1.138.399	1.143.723	1.149.566
2	LPP (%)	0,462	0,468	0,511
3	AHH (Thn)	70,94	71,07	71,46
4	AMH (%)	98,10	98,51	98,71
5	Rata-rata Lama Sekolah (Thn)	8,67	8,78	8,82
6	IPM	73,36	73,70	74,11
	- Indeks Pendidikan	84,67	85,19	85,40
	- Indeks Kesehatan	76,57	76,78	77,43
	- Indeks Daya Beli	58,83	59,11	59,51
7	Daya Beli (Rp 000)	554,60	555,8	557,49
12	Angka Beban Tanggungan (ABT)	51,41	51,39	49,80
13	Jumlah Pengangguran (orang)	27.734	25.909	26.039
14	Pengangguran (%)	5,52	5,13	5,47
15	PAD (Rp Milyar)	112,33	185,69	209,61

Tabel 2.3 Komponen IPM Tahun 2010 – 2014

Variabel IPM	2010		2011		2012		2013		2014	
(poin)	Kab	Jabar	Kab	Jabar	Kab	Jabar	Kab	Jabar	Kab	Jabar
IPM	72,61	72,29	72,82	72,73	72,89	73,11	73,36	73,4	73,7	74,28
Indeks Pendidikan	84	81,67	84,12	82,55	84,38	82,75	82,75	82,31	85,19	83,36
RLS	8,48	7,95	8,5	8,06	8,64	8,08	8,67	8,09	8,78	8,34
AMH	97,74	96	97,78	96,29	97,76	96,39	98,1	96,49	98,51	98,29
Indeks Kesehatan	76,26	72	76,93	72,34	76,35	72,67	76,57	72,99	76,78	74,01
AHH	70,76	68,2	70,79	68,4	70,81	68,6	70,94	68,8	71,07	69,02
Indeks Daya Beli	57,57	62,57	58,62	63,57	57,94	64,17	58,83	64,89	59,11	65,47

PPP (Ribu Rupiah)	549,1	630,8	551,3	635,1	550,7	637,7	554,6	640,9	555,8	644,4
-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat 2015

Gambaran kondisi pendidikan di Kabupaten Kuningan dapat dilihat pada tabel Indeks Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah dari tingkat SD sampai dengan SLT, sebagai berikut:

Tabel 2.4 Gambaran Kondisi Pendidikan

Indikator	Tahun Ajaran				
	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
APK SD	103,42	106,28	106,43	103,37	N/A
APM SD	99,79	99,52	99,68	99,78	N/A
APK SLTP	96,64	97,1	98,78	98,84	N/A
APM SLTP	88,76	89,45	90,21	90,52	N/A
APK SLTA	56,2	59,1	61,83	69,43	N/A
APM SLTA	43,73	45,51	47,39	53,49	N/A

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat 2015

2.4 Ekonomi

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan Kabupaten Kuningan, pada Tahun 2014 mencapai Rp. 12.364.92 milyar, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp. 11.633,75 milyar, hal ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2013 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,28 persen di bandingkan Tahun 2011. Pada tahun 2014 nilai PDRB tertinggi terjadi pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan nilai 3.703.793,20 atau sebesar 24,77 persen, dan yang terendah terjadi pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas dengan nilai 11.016,74 atau sebesar 0,07 persen.

Tabel 2.5 Indikator Makro Ekonomi dan Infrastruktur

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014
Penduduk (Jiwa)	1.122.376	1.054.183	1.133.164	1.138.399	1.143.723
LPE (%)	4,99	5,43	4,73	N/A	6.28
LPP (%)	0,476	0,65	0,479	0,462	0.468
PDRB Harga Berlaku (Rp.)	9.131.570	10.018.855	11.025.911	N/A	14.955.531,62
PDRB Harga Konstan	3.967.069	4.182.402	4.380.046	N/A	12.364.916,



(Rp.)					20
PDRB perkapita Harga Berlak (Rp.)	8.817.755	9.503.904	10.441.368	N/A	N/A
PDRB perkapita Harga Konstan (Rp.)	3.830.737	3.967.434	4.146.691	N/A	N/A
Investasi (Triliun Rupiah)	0,054	283,99	488,78	N/A	N/A
Kemiskinan (%)	14,68	14,2	N/A	N/A	N/A
Pengangguran Terbuka (%)	5,17	4,61	4,13	5,52	5.13

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2015.

Tahun 2014 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kuningan tercatat sebesar 6,28 persen, sedangkan pada Tahun 2013 mencapai 6,12 persen. Ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peran sektor ekonomi selama tahun 2014 terhadap PDRB sektor pertanian memberikan sumbangan terbesar sebesar 24,77 persen disusul sektor jasa sebesar 22,19 persen dan sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 16,64 persen.

Tabel 2.6 Indikator Keuangan Daerah

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PAD Murni (juta Rp)	70.927	79.210	88.198	109.128	142.810	209.607
DAU (juta Rp)	660.391	722.474	892.633	998.587	1.112.272	1.127.613
DAK (juta Rp)	77.738	69.431	68.156	62.125	74.369	74.112
Dana Bagi Hasil (juta Rp)	56.495	71.182	61.807	71.299	58.249	73.000
Bantuan Provinsi (juta Rp.)	48.178	15.582	-	94.919	5.500	2.500
Volume APBD (juta Rp)	1.013.071	1.178.591	1.278.898	1.608.494	1.438.416	2.051.895

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2015.

2.5 Sarana dan Prasarana

Kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Kuningan masih memerlukan perhatian, apalagi dengan melihat kondisi beban angkutan juga gangguan bencana alam yang dapat memicu cepatnya kerusakan jalan.

Gambaran infrastruktur jalan di Kabupaten Kuningan dan kondisinya pada tahun 2014, ditampilkan pada tabel berikut:

Kondisi	Jalan Kabupaten		Jalan Poros Desa		Jembatan	
	Panjang (km)	%	Panjang (km)	%	Panjang (km)	%
Baik	291	69,94	185,61	36,48	158	73,83
Sedang	38,09	9,15	198,3	38,47	44	20,56
Rusak	46	11,06	96,3	18,93	12	5,61
Rusak Berat	41,02	9,86	28,6	5,62		
Jumlah	416.10	100	508,81	100	214	100

BAB III

VISI-MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Visi dan Misi

Visi, dan Misi Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Pariwisata Alam dan Budaya Kabupaten Kuningan berdasarkan Rencana Strategis Pembangunan Kabupaten, Rencana Pembangunan Desa, serta antisipasi potensi dan masalah, maka untuk periode lima tahun ke depan 2017-2022 adalah sebagai berikut :

3.1.1 Visi

Visi Kawasan Perdesaan sejalan dengan visi Kabupaten Kuningan, yaitu :
“Kuningan Mandiri, Agamis, dan Sejahtera Tahun 2018”

3.1.2 Misi

Misi Pembangunan Kawasan Perdesaan berbasis Pariwisata Alam dan Budaya, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia;
2. Memantapkan Keunggulan Kawasan;
3. Meningkatkan Percepatan Penanggulangan Keminiskinan;
4. Memantapkan Pelestarian Sumberdaya Alam dan Lingkungan; dan
5. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik.

3.2 Tujuan

Mengacu kepada Visi dan Misi Kawasan Perdesaan Kawasan Perdesaan berbasis Pariwisata Alam dan Budaya, di atas, maka Tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan yaitu:

- a. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan desa;
- b. Meningkatnya sarana transportasi ke objek wisata;



- c. Terbentuknya BUMDes bersama dalam mendukung pengembangan kawasan perdesaan;
- d. Meningkatnya kualitas SDM;
- e. Meningkatnya pengelolaan objek wisata; dan
- f. Berkembangnya agroindustri untuk oleh-oleh;

3.3 Sasaran

Mengacu kepada tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan Perdesaan berbasis Pariwisata Alam dan Budaya, Kabupaten Kuningan. Maka secara spesifik, Sasaran pembangunan untuk lima tahun ke depan, meliputi namun tidak terbatas pada :

- a. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan desa;
- b. Meningkatnya kualitas sarana prasarana objek wisata;
- c. Terbentuknya kemitraan dalam pengelolaan transportasi;
- d. Terbentuknya BUMDes pada semua desa yang tergabung dalam kawasan perdesaan;
- e. Terbentuknya BUMDes bersama dalam mendukung pengembangan kawasan perdesaan;
- f. Meningkatnya kualitas SDM dalam pengelolaan pariwisata;
- g. Meningkatnya kualitas SDM dalam pengembangan agroindustri;
- h. Meningkatnya pengelolaan objek wisata;
- i. Berkembangnya agroindustri untuk oleh-oleh;
- j. Meningkatnya sinergitas dalam pembangunan kawasan perdesaan.

Target Kinerja Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan Perdesaan berbasis Pariwisata Alam dan Budaya. yaitu:

- 1. Meningkatnya jumlah pengunjung kawasan Pariwisata Alam dan Budaya (50%);
- 2. Meningkatnya pendapatan masyarakat dari kegiatan pariwisata (50%)
- 3. Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat dengan diindikasikan peningkatan IPM. (50%).



3.4 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 2017-2022, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Strategi dan arah kebijakan yang dituangkan dalam dokumen Pembangunan Kawasan Perdesaan agar sejalan dan menjadi bagian program Kementerian/Lembaga di tingkat Pusat, Dinas/Badan terkait di tingkat Provinsi, dan Dinas/Badan terkait di tingkat Kabupaten, maka Kawasan Perdesaan berbasis Pariwisata Alam dan Budaya dibagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

1. Strategi dan arah kebijakan tingkat Nasional (penugasan dari UU Desa, UU Penataan Ruang, dan RPJMN 2015-2019);
2. Strategi dan arah kebijakan tingkat Provinsi (RPJMD Provinsi);
3. Strategi dan arah kebijakan tingkat Kabupaten (RPJMD Kabupaten).
43. Strategi dan arah kebijakan tingkat Kawasan Perdesaan.

3.4.1 Strategi dan Arah Kebijakan Tingkat Nasional

Arah Kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan mengacu kepada:

1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019,
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015-2019,
5. Kebutuhan penanganan permasalahan kawasan perdesaan yang muncul sebagai dinamika terbaru serta menjadi prioritas Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan. Kawasan Perdesaan terkait rencana struktur ruang wilayah (nasional, provinsi, ataupun kabupaten) dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana. Rencana tata ruang kawasan perdesaan merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten yang dapat disusun sebagai instrumen pemanfaatan ruang untuk mengoptimalkan kegiatan pertanian (dalam arti luas) yang dapat berbentuk kawasan agropolitan.

Pengertian kawasan agropolitan menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 yaitu kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan memiliki hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis.

Penataan ruang kawasan perdesaan menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 diarahkan untuk:

1. Pemberdayaan masyarakat perdesaan;
2. Pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya;
3. Konservasi sumberdaya alam;
4. Pelestarian warisan budaya lokal;
5. Pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan;
dan
6. Penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan.

Pembangunan Kawasan Perdesaan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 83 ayat (3) meliputi:

1. penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota;
2. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;



3. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
4. pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Pembangunan Kawasan Perdesaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Beberapa pengaturan yang terkait dengan Kawasan Perdesaan yaitu:

1. Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
2. Pembangunan kawasan perdesaan terdiri atas:
 - a. Penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;
 - b. Pengembangan pusat pertumbuhan antar-Desa secara terpadu;
 - c. Penguatan kapasitas masyarakat;
 - d. Kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
 - e. Pembangunan infrastruktur antarperdesaan.
3. Pembangunan kawasan perdesaan memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa serta pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh Desa di kawasan perdesaan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, termasuk di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi dan kepulauan dan pulau kecil, menurut RPJMN 2015-2019 yaitu:



1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa termasuk permukiman transmigrasi sesuai dengan kondisi geografis Desa, melalui strategi:
 - a. meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perumahan dan fasilitas permukiman;
 - b. meningkatkan ketersediaan tenaga pengajar serta sarana dan prasarana pendidikan;
 - c. meningkatkan ketersediaan tenaga medis serta sarana dan prasarana kesehatan;
 - d. meningkatkan ketersediaan sarana prasarana perhubungan antar permukiman ke pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, dan pusat kegiatan ekonomi; dan
 - e. meningkatkan ketersediaan prasarana pengairan, listrik dan telekomunikasi.
2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa termasuk di permukiman transmigrasi, melalui strategi:
 - a. fasilitasi pengelolaan BUM Desa serta meningkatkan ketersediaan sarana prasarana produksi khususnya benih, pupuk, pasca panen, pengolahan produk pertanian dan perikanan skala rumah tangga desa;
 - b. fasilitasi, pembinaan, maupun pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan; dan
 - c. meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tepat Guna.
3. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa termasuk di permukiman transmigrasi melalui strategi:
 - a. mengembangkan pendidikan berbasis ketrampilan dan kewirausahaan;
 - b. memberi pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat;

- c. mengembangkan kapasitas dan pendampingan kelembagaan kemasyarakatan desa dan kelembagaan adat secara berkelanjutan;
 - d. meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat termasuk perempuan, anak, pemuda dan penyandang disabilitas melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan desa;
 - e. menguatkan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan, serta lingkungan hidup desa termasuk desa pesisir secara berkelanjutan; dan
 - f. meningkatkan partisipasi dan kapasitas tenaga kerja (TKI/TKW) di desa.
4. Pengawasan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan dengan strategi:
- a. konsolidasi satuan kerja lintas Kementerian/Lembaga;
 - b. memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa sejalan dengan substansi, jiwa, dan semangat UU Desa, termasuk penyusunan PP Sistem Keuangan Desa;
 - c. memastikan distribusi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berjalan secara efektif, berjenjang, dan bertahap;
 - d. mempersiapkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengoperasionalisasi pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk dapat ditetapkan menjadi desa adat.
5. Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan melalui strategi:
- a. meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam (i) perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa; (ii) pengelolaan aset dan keuangan desa; (iii) penyiapan peta desa dan penetapan batas desa secara digital;

- b. Reformasi pelayanan publik termasuk pelayanan di luar jam kantor oleh desa, kelurahan, dan kecamatan;
 - c. meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pemerintahan desa;
 - d. mengembangkan kerjasama antar desa;
 - e. melaksanakan penataan desa; dan
 - f. mengembangkan pusat informasi desa/balai rakyat.
6. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi melalui strategi:
- a. menjamin pelaksanaan distribusi lahan kepada desa-desa dan distribusi hak atas tanah bagi petani, buruh lahan, dan nelayan;
 - b. menata ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi;
 - c. menyiapkan dan melaksanakan kebijakan untuk membebaskan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan;
 - d. menyiapkan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal termasuk pengelolaan hutan negara oleh desa berorientasi keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan;
 - e. menyiapkan dan menjalankan kebijakan-regulasi baru tentang *shareholding* antara pemerintah, investor, dan desa dalam pengelolaan sumber daya alam;
 - f. menjalankan program-program investasi pembangunan perdesaan dengan pola *shareholding* melibatkan desa dan warga desa sebagai pemegang saham;
 - g. merehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar dan terkena dampak bencana khususnya di daerah pesisir dan daerah aliran sungai.

7. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota melalui strategi:
 - a. mewujudkan dan mengembangkan sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata;
 - b. meningkatkan akses transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah;
 - c. mengembangkan kerjasama antar desa, antar daerah, dan antar pemerintah-swasta termasuk kerjasama pengelolaan BUMDesa, khususnya di luar Jawa-Bali; dan
 - d. membangun agribisnis kerakyatan melalui pembangunan bank khusus untuk pertanian, UMKM, dan Koperasi;
 - e. membangun sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan;
 - f. mengembangkan komunitas teknologi informasi dan komunikasi bagi petani untuk berinteraksi dengan pelaku ekonomi lainnya dalam kegiatan produksi panen, penjualan, distribusi, dan lain-lain.

3. 4. 2 Strategi dan Arah Kebijakan Tingkat Provinsi

Strategi dan arah kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam RPJMD tahun 2013-2018 Common Goals (CG) dan skenario pembangunan berbasis kewilayahan melalui Wilayah Pengembangan (WP) dan Wilayah Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (WKPP), yang terkait Pembangunan Kawasan Perdesaan, yaitu:

1. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan
 - a. Jabar bebas putus jenjang sekolah.
 - b. Peningkatan pelayanan pendidikan non formal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke atas.
2. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan
 - a. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, puskesmas PONED dan pemenuhan sumber daya kesehatan.
 - b. Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak



- c. Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.
3. Mengembangkan infrastruktur wilayah, energi dan air baku
 - a. Jabar mandiri energi perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestik.
 - b. Pemenuhan kecukupan air baku dan pengembangan infrastruktur air bersih perkotaan dan perdesaan di Jawa Barat.
4. Meningkatkan ekonomi non pertanian
 - a. Peningkatan budaya masyarakat bekerja, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha UMKM.
 - b. Pengembangan industri keratif dan wirausahawan muda kreatif.
5. Meningkatkan ekonomi pertanian
 - a. Pengembangan agribisnis, forest business, marine business, dan agroindustry.
 - b. Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan dan irigasi) disentra produksi pangan.
6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan
 - a. Konservasi dan rehabilitasi kawasan lindung 45%.
 - b. Pengendalian pencemaran limbah industri, limbah domestik dan pengelolaan sampah regional.
 - c. Penanganan bencana longsor dan banjir.
7. Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan
 - a. Pelestarian seni budaya tradisional dan benda cagar budaya di Jawa Barat.
 - b. Pengembangan Destinasi wisata.
8. Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan

- a. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga.
9. Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial dan Keamanan
- a. Pengurangan Kemiskinan.
 - b. Peningkatan ketentraman dan keamanan masyarakat
10. Wilayah perbatasan Jawa Barat - Jawa Tengah
- a. Kesehatan, dengan fokus penanganan keluarga miskin.
 - b. Infrastruktur Jalan dan Jembatan, dengan fokus pembangunan dan peningkatan jalan serta pembangunan jembatan
 - c. Pertanian, dengan fokus pemberantasan hama, pertanian multi aktivitas (padi – ternak), serta relokasi dan optimalisasi check point ternak dan hasil hutan.
 - d. Pariwisata, dengan fokus koordinasi dan pengembangan paket wisata.
11. WP dan WKPP Wilayah Kuningan (Kuningan Raya, Kabupaten Kuningan, Indramyu, dan Majalengkan)
- a. Mengembangkan agribisnis buah-bahan, tebu dan industrialisasi perikanan, sentra ternak sapi perah, sapi potong, kerbau dan unggas lokal;
 - b. Mengembangkan industri batik dan rotan, serta industri makanan olahan berbahan baku lokal
 - c. Melestarikan keraton, wisata sejarah dan mengembangkan ekowisata;
 - d. Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi, jagung, kedelai dan protein hewani);
 - e. Peningkatan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi;
 - f. Peningkatan fungsi kawasan lindung;
 - g. Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana;
 - h. Peningkatan pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - i. Pengembangan energi baru terbarukan

- j. Pembangunan infrastruktur transportasi;
12. WP dan WKPP Priangan (Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Kuningan Barat, Kota Cimahi dan sebagian Kabupaten Sumedang)
- a. Mengembangkan produksi tanaman industri (Pariwisata Alam dan Budaya, teh, kakao, karet, atsiri) dan hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias) yang berorientasi ekspor;
 - b. Mengembangkan jasa perdagangan, industri kreatif dan pariwisata
 - c. Peningkatan investasi;
 - d. Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi, jagung, kedelai dan protein hewani);
 - e. Peningkatan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi;
 - f. Peningkatan fungsi kawasan lindung;
 - g. Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana;
 - h. Peningkatan pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - i. Pengembangan energi baru terbarukan
 - j. Pembangunan infrastruktur transportasi;

3. 4. 3 Strategi dan Arah Kebijakan Tingkat Kabupaten

Strategi dan arah kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan di tingkat Kabupaten, mengacu kepada Misi dan Tujuan RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018, yaitu:

Misi Pembangunan Kabupaten Kuningan dalam RPJMD 2014-2018:

Misi 1: Meningkatkan **kualitas sumberdaya manusia** melalui penanaman nilai agama, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing dan pengarusutamaan gender dalam kehidupan berbudaya dan harmonis.

Misi 2: Memantapkan **keunggulan kawasan** agropolitan, pariwisata daerah, sektor unggulan lainnya, peningkatan investasi ramah lingkungan, serta peningkatan sarana dan prasarana daerah



Misi 3: Meningkatkan **percepatan penanggulangan kemiskinan**, melalui pelayanan sosial terpadu dan pemberdayaan masyarakat.

Misi 4: Memantapkan **pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan** hidup dalam kerangka Kabupaten Konservasi dengan menerapkan asas kehidupan berkelanjutan.

Misi 5: Mewujudkan **tata pemerintahan yang baik** dan pengembangan **kerjasama daerah**.

Tujuan Pembangunan Kabupaten Kuningan dalam RPJMD 2014-2018:

1. Membangun sumberdaya manusia yang unggul dan berbudaya;
2. Membangun pemahaman dan implementasi kesetaraan gender;
3. Menggali dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, keunggulan lokal, investasi dan promosi potensi daerah;
4. Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan penyediaan infrastruktur daerah;
5. Membangun sistem terpadu dalam penanggulangan kemiskinan;
6. Meningkatkan kemandirian dalam pemberdayaan masyarakat;
7. Meningkatkan implementasi asas-asas Kabupaten Konservasi dalam berbagai sektor pembangunan;
8. Menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan daya tahan masyarakat (*society resilience*);
9. Membangun birokrasi yang efisien dan aparatur yang profesional;
10. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan (*good governance*);
11. Meningkatkan potensi ekonomi regional.

Strategi Pembangunan Kabupaten Kuningan dalam RPJMD 2014-2018:

1. Mengembangkan komitmen semua pihak terkait dalam pengembangan kawasan perdesaan;
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan desa dengan mengembangkan sumber pendanaan baik dari dana desa, APD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN;



3. Meningkatnya sarana transportasi ke objek wisata dengan mengembangkan kemiteraan dengan pihak ketiga;
4. Memperkuat kelembagaan BUMDes bersama dalam mendukung pengembangan kawasan perdesaan;
5. Meningkatnya kualitas SDM dalam pengelolaan objek wisata dan agroindustri;
6. Mengembangkan promosi secara terpadu dan kerjasama dengan biro wisata.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kuningan dalam RPJMD 2014-2018:

1. Peningkatan kualitas infrastruktur;
2. Peningkatan kualitas pelayanan dan jaminan kesehatan masyarakat;
3. Peningkatan kualitas SDM masyarakat;
4. Peningkatan dan pementapan Ketahanan Pangan;
5. Penurunan angka pengangguran;
6. Penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
7. Peningkatan manajemen dan promosi pariwisata daerah;
8. Peningkatan promosi dan pemasaran produk UMKM.
9. Perlindungan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup;

3. 4. 4 Strategi dan Arah Kebijakan Tingkat Kawasan Perdesaan

Strategi dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan Perdesaan berbasis Pariwisata Alam dan Budaya, ditetapkan, dengan mempertimbangkan kondisi umum kawasan, potensi dan permasalahan, trend perkembangan Nasional dan Dunia, serta strategi dan kebijakan Pemerintah di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten.

Guna memetakan seluruh aspek terkait pengembangan kawasan menjadi strategi dan arah kebijakan pembangunan kawasan perdesaan Kawasan Perdesaan berbasis Pariwisata Alam dan Budaya maka dibuat Analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats/ SWOT) dengan fokus pada kondisi eksisting dan potensi pengembangan aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Komoditas yang menjadi tema Kawasan, (Pertanian, Pon-Pertanian, atau Gabungan)



- b. Infrastruktur Kawasan, (transportasi, utilitas, energi, dan telekomunikasi)
- c. Kapasitas Keuangan dan Alternatif Pembiayaan Kawasan, (Sumber pembiayaan APBN, APBD-Prov, APBD Kabupaten, APBDes, CSR, Donor, Swadaya dll.)
- d. Aspek Pasar dan Pemasaran komoditas Kawasan, (target-target pasar, kemitraan, dan strategi pemasarannya)
- e. Aspek Kelembagaan Kawasan, (Peranan lembaga eksisting seperti Bumdes, Koperasi, Kelompok Usaha Bersama, dan Kelompok Masyarakat lainnya)
- f. Aspek Masyarakat dan SDM Kawasan Perdesaan, (aspek pemberdayaan guna membangun kemandirin pengelolaan dan pengembangan kawasan)
- g. Aspek IPM Kawasan, (operasionalisasi sarana pendidikan, kesehatan dan perekonomian kawasan).
- h. Aspek-aspek lainnya yang berpengaruh terhadap komoditas unggulan/tema kawasan.

**Tabel II.1 Target Kinerja Pengembangan Kawasan Perdesaan Kecamatan Ciwaru
Kabupaten Kuningan**

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Kunjungan Wisata	42.452	49.528	56.603	63.679	70.754
Pendapatan objek wisata	240.000.000	280.000.000	320.000.000	360.000.000	400.000.000
IPM	72,23	72,53	72,83	73,13	73,43
IDM Ciwaru	0,6866	0,7166	0,7466	0,7766	0,8066
IDM Sumber Jaya	0,6390	0,6690	0,6990	0,7290	0,7590
IDM Citundun	0,5604	0,5904	0,6204	0,6504	0,6804
IDM Sagaranten	0,6214	0,6514	0,6814	0,7114	0,7414

Tabel III.2 Analisis SWOT Penetapan Strategi dan Arah Kebijakan

Instruksi Pengisian	Analisis SWOT	
	Kekuatan/Keunggulan	Kelemahan
Berdasarkan pertimbangan kondisi eksisting dan potensi pengembangan ke depan, masukkan aspek-aspek di atas kedalam kolom Kekuatan, Kelemahan, Peluang, atau Ancaman. Selanjutnya isi upaya-upaya yang dapat dilakukan (sebagai bahan strategi dan arah kebijakan) untuk: - Meningkatkan keunggulan guna memaksimalkan peluang; - Memperbaiki kelemahan guna meningkatkan peluang; - Meningkatkan keunggulan guna mengatasi ancaman; dan - Memperbaiki kelemahan guna mengatasi ancaman.	Aspek Keunggulan Kawasan antara lain: 1. Keindahan alam berupa air terjun dan landscape pertanian khas Kuningan 2. Memiliki regulasi (Keputusan Bupati) sebagai Kawasan Perdesaan berbasis Pariwisata Alam dan Budaya 3. Kombinasi Pariwisata Alam dan Budaya seperti Cadas, beragam air terjun (curug), geopark (batu alam) dan Arkeologi (artefak/arca) 4. Kerajinan tangan bamboo dan makanan khas menjadi icon pelengkap pariwisata. 5. Kelompok Masyarakat desa terlibat langsung sebagai pengelola obyek wisata. 6. Jumlah kunjungan wisatawan sudah lebih dari 35 ribu orang per tahun dan dapat menghasilkan pemasukkan lebih dari 10 juta Rupiah per Bulan.	Aspek Kelemahan Kawasan antara lain: 1. Jarak dari ibukota Kab Kuningan ke kawasan perdesaan, cukup jauh 2. Akses jalan menuju kawasan dan antar (poros) desa masih terdapat yang rusak dan belum terhubung 3. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata masih terbatas dan kurang memadai 4. Pengelolaan obyek pariwisata belum sesuai standar Kementerian Pariwisata 5. Kapasitas manajemen dan SDM pengelola obyek wisata masih terbatas 6. Produk kerajinan dan kuliner masih perlu dikembangkan dan distandarisasi. 7. Belum ada nya promosi dan pemasaran obyek wisata secara terpadu.
Aspek Peluang Pengembangan Kawasan antara lain: 1. Dukungan peningkatan fasilitas dan prasarana pengembangan kawasan pariwisata dari Kementerian, Pemprov Jabar, Pemkab Kuningan 2. Berfungsinya tol Cipali, Cisumdawu, dan Bandara Kertajati akan mempermudah	Meningkatkan Keunggulan guna Memaksimalkan Peluang 1. Menata rencana pengembangan obyek wisata sebagai bagian dari program RPKP agar dapat memenuhi kriteria pembiayaan dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. 2. Memperkuat regulasi dan kontribusi pihak Pemerintah Desa, sebagai syarat intervensi	Memperbaiki Kelemahan guna Memaksimalkan Peluang 1. Memperbaiki akses jalan utama menuju kawasan dan obyek wisata, serta menyediakan sarana transportasi khusus kawasan. 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana obyek wisata

wisatawan datang ke Kuningan 3. Meningkatnya minat wisatawan terhadap obyek-obyek wisata alam baru dan minat khusus. 4. Kerjasama dengan Kabupaten Kuningan dan Majalengka dalam pengembangan Destinasi Wisata bersama dapat menambah waktu tinggal wisatawan 5. Kegiatan wisata di kawasan PHBM dapat diusulkan pembiayaan dengan skema Jasa Lingkungan (PES) dari pihak Donor. 6. Sinergisme seluruh stakeholder dalam pengelolaan obyek wisata, dengan pembentukan BUMDES dan BUMDES Bersama.	dari K/L terkait 3. Melakukan kerjasama antar daerah guna membangun destinasi wisata bersama dengan Kab. Kuningan dan lainnya. 4. Mengelola kawasan dan obyek wisata dengan prinsip green development dan konservasi guna memenuhi kriteria PES. 5. Pendirian BUMDES guna mendorong pengadaan sarana penunjang obyek wisata seperti pusat oleh-oleh dan kuliner, akomodasi (home stay) dan business centre. 6. Melakukan pembagian peran, tugas, dan fungsi masing-masing BUMDES dalam Kerangka BUMDES bersama.	3. Merevitalisasi manajemen pengelolaan obyek wisata mengacu pada standar yang ditetapkan Kementerian Pariwisata 4. Meningkatkan kapasitas manajemen dan SDM pengelola melalui kegiatan pelatihan dan studi banding difasilitasi BUMDES Bersama. 5. Mengembangkan produk kerajinan dan kuliner dari aspek bahan baku, pengemasan, pemasaran dan pembiayaan melalui skema inkubasi bisnis. 6. Melakukan kegiatan promosi dan pemasaran obyek wisata secara terpadu melalui media cetak dan digital.
ANCAMAN	Upaya-Upaya Meningkatkan Keunggulan guna Mengatasi Ancaman	Upaya-Upaya Memperbaiki Kelemahan guna Mengatasi Ancaman
Aspek Ancaman terhadap Kawasan antara lain: 1. Masih kurangnya kesadaran pengunjung untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di lokasi obyek wisata 2. Munculnya pengusaha swasta yang mengakuisisi lahan atau membuka kawasan pariwisata yang lebih lengkap dan menarik. 3. Masih minimnya regulasi teknis di tingkat pusat terkait penggunaan lahan, intervensi sektoral, dan pendanaan.	Meningkatkan Keunggulan guna Mengatasi Ancaman 1. Memaksimalkan peran Kelompok Masyarakat Sadar Wisata untuk selalu mengawasi dan memberikan penyuluhan kebersihan dan kelestarian lingkungan. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pengunjung, memunculkan industri kreatif, event dan kekhasan kawasan. 3. Pro-aktif menyampaikan usulan dan potensi kendala kepada K/L terkait.	Memperbaiki Kelemahan guna Mengatasi Ancaman 1. Membangun banyak tempat sampah dan papan peringatan di lokasi-lokasi strategis dan membangun TPST kawasan 2. Mendorong pihak Pemerintah Daerah untuk membatasi ijin wisata di kawasan, hanya untuk wisata berbasis konservasi, tidak untuk jenis wisata buatan manusia. 3. Mengusulkan sejak awal status pengelolaan aset hasil intervensi K/L

Berdasarkan upaya-upaya peningkatan keunggulan dan perbaikan kelemahan Kawasan Perdesaan di atas, maka dapat disusun strategi dan arah kebijakan yang sesuai guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Secara lengkap, strategi dan arah kebijakan untuk masing-masing sasaran RPKP disusun pada tabel 5.2 di bawah ini.

Tabel II.3 Strategi dan Arah Kebijakan untuk Masing-Masing Sasaran RPKP

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan desa;	Memperbaiki akses jalan utama menuju kawasan dan obyek wisata	Meningkatkan kualitas jalan menuju kawasan dari Ibukota Kabupaten dan Kecamatan, serta poros desa mulai tahun anggaran 2017
2.	Meningkatnya kualitas sarana prasarana objek wisata;	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana obyek wisata	Membangun sarana dan prasarana penunjang ODTW, seperti tempat parkir, MCK, Akomodasi, tempat ibadah, pusat oleh-oleh dan kuliner mulai tahun anggaran 2017
3.	Terbentuknya kemitraan dalam pengelolaan transportasi;	Menyediakan sarana transportasi khusus kawasan.	Membentuk kemitraan BUMDES dengan Kelompok Masyarakat Pengelola untuk pengadaan sarana transportasi khusus dan khas obyek wisata kawasan mulai tahun anggaran 2018
4.	Terbentuknya BUMDes pada semua desa yang tergabung dalam kawasan perdesaan;	Pendirian BUMDES guna mendorong pengadaan sarana penunjang obyek wisata seperti pusat oleh-oleh dan kuliner, akomodasi (home stay) dan business centre, dll.	BPMPD mendorong pembentukan BUMDES guna mendorong pengadaan sarana penunjang obyek wisata seperti pusat oleh-oleh dan kuliner, akomodasi (home stay) dan business centre, dll. Mulai tahun anggaran 2017
5.	Terbentuknya BUMDes bersama dalam mendukung pengembangan kawasan perdesaan;	Melakukan pembagian peran, tugas, dan fungsi masing-masing BUMDES dalam Kerangka BUMDES bersama.	BPMPD memfasilitasi pembentukan BUMDES bersama guna penguatan kapasitas manajemen pengelolaan obyek wisata di kawasan perdesaan mulai tahun anggaran 2017
6.	Meningkatnya kualitas SDM dalam pengelolaan pariwisata dan pengembangan agroindustri;	Meningkatkan kapasitas manajemen dan SDM pengelola melalui kegiatan pelatihan dan studi banding difasilitasi BUMDES Bersama	BPMPD dan Bappeda memfasilitasi kegiatan pelatihan dan pemberdayaan SDM di bidang pariwisata dan agroindustri melalui program BPMPD, Dinas, atau OPD terkait, mulai

			tahun anggaran 2017
7.	Meningkatnya pengelolaan objek wisata;	- Merevitalisasi manajemen pengelolaan obyek wisata mengacu pada standar yang ditetapkan Kementerian Pariwisata - Melakukan kegiatan promosi dan pemasaran obyek wisata secara terpadu melalui media cetak dan digital - Memaksimalkan peran Kelompok Masyarakat Sadar Wisata untuk selalu mengawasi dan memberikan penyuluhan kebersihan dan kelestarian lingkungan. - Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pengunjung dan memunculkan industri kreatif, event dan kekhasan kawasan. - Mendorong pihak Pemerintah Daerah untuk membatasi ijin wisata di kawasan, tidak untuk jenis wisata buatan manusia.	- BPMD memfasilitasi revitalisasi manajemen pengelolaan obyek wisata secara teknis dan kelembagaan, mulai tahun 2017 - BPMPD dan Dinas Pariwisata memfasilitasi kegiatan promosi dan pemasaran obyek wisata secara terpadu melalui media cetak dan digital, mulai tahun 2017 - BPMD, Dinas Pariwisata, dan Dinas Kebersihan mendorong peran Kelompok Masyarakat Sadar Wisata untuk selalu mengawasi dan memberikan penyuluhan kebersihan dan kelestarian lingkungan, mulai tahun 2017 - BPMPD dan Dinas Pariwisata memfasilitasi peningkatan kualitas pelayanan terhadap pengunjung, memunculkan industri kreatif, event dan kekhasan kawasan. Mulai tahun anggaran 2018. - Bappeda dan BPMD mendorong regulasi yang membatasi ijin wisata di kawasan, hanya untuk wisata berbasis konservasi, tidak untuk jenis wisata buatan manusia. Mulai tahun 2018.
8.	Berkembangnya agroindustri untuk oleh-oleh;	Mengembangkan produk kerajinan dan kuliner dari aspek bahan baku, pengemasan, pemasaran dan pembiayaan melalui skema inkubasi bisnis	Bappeda, BPMD, dan Dinas terkait memfasilitasi pengembangan produk kerajinan dan kuliner dari aspek bahan baku, pengemasan, pemasaran dan pembiayaan melalui skema inkubasi bisnis, mulai tahun 2018.
9.	Meningkatnya sinergitas dalam pembangunan kawasan perdesaan.	- Melakukan pembagian peran, tugas, dan fungsi masing-masing BUMDES dalam Kerangka BUMDES bersama. - Mengelola kawasan dan obyek wisata dengan prinsip green development dan konservasi	- BPMPD memfasilitasi pembentukan dan operasional masing-masing BUMDES, serta memfasilitasi pembentukan BUMDES bersama. Mulai tahun 2017. - Bappeda dan Dinas Kehutanan memfasilitasi pengelolaan kawasan dan obyek wisata dengan prinsip

		guna memenuhi kriteria PES. - Melakukan kerjasama antar daerah guna membangun destinasi wisata bersama dengan Kab. Kuningan dan lainnya. - Pro-aktif menyampaikan usulan dan potensi kendala kepada K/L atau instansi terkait. Serta Mengusulkan sejak awal status pengelolaan aset hasil intervensi K/L.	green development dan konservasi guna memenuhi kriteria PES. Mulai tahun 2019. - Bappeda dan Sekda memfasilitasi kerjasama antar daerah guna membangun destinasi wisata bersama dengan Kab. Kuningan dan lainnya. Mulai tahun 2018 - Bappeda dan BPMDP mendorong BUMDES/BUMDESA Pro-aktif menyampaikan usulan dan potensi kendala kepada K/L atau instansi terkait. Serta Mengusulkan sejak awal status pengelolaan aset hasil intervensi K/L. Mulai tahun 2019.
--	--	--	---

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 Program dan Kegiatan

Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh institusi/lembaga terkait di tingkat Kawasan, namun tidak tertutup kemungkinan merupakan intervensi/ tugas pembantuan dari institusi/lembaga Pemerintah di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten, atau pun juga donor atau pemberi dana CSR. Penyusunan program mengacu kepada sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah dibahas pada Bab 5.

Outcome yang diharapkan dari program Pembangunan Kawasan Perdesaan secara umum adalah: Terwujudnya Percepatan dan Peningkatan Pelayanan Dasar, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Perdesaan melalui Pendekatan Pembangunan Partisipatif.

Kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja terkait (baik di tingkat Kawasan Perdesaan atau lainnya), yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Ruang lingkup Program/ kegiatan unggulan (fokus masing-masing kegiatan) berdasarkan Matriks Isian Lintas Sektor Bappenas adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Transportasi, SDA, dan Cipta Karya**

Ruang lingkup kegiatan meliputi: Pembangunan baru, rehabilitasi, atau peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi di Kawasan Perdesaan yang memiliki peran penting dalam transportasi manusia, barang, dan jasa secara aman, ekonomis, dan nyaman, terdiri dari sub-program :

- 1.1 Rehabilitas dan Pembangunan Jalan Poros Kawasan Perdesaan;
- 1.2 Rehabilitasi dan Pembangunan Jalan Usaha Tani menuju objek wisata;
- 1.3 Penataan Bumi Perkemahan di Kawasan Wisata;
- 1.4 Peningkatan Jalan Dusun Kawasan Perdesaan;
- 1.5 Pembangunan sarana prasarana Air Minum;
- 1.6 Pembangunan sanitasi bertumpu Pada Masyarakat (SABERMAS);

Terdapat 6 Sub-Program dan 17 Paket Kegiatan yang direncanakan selama periode 2017-2021, dengan nilai total 107,17 milyar Rupiah.

2) Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Sentra Produksi, Sentra Industri Pengolahan, Hasil Pertanian dan Perikanan, serta Destinasi Wisata

Ruang lingkup kegiatan: Pembangunan baru, rehabilitasi atau peningkatan kapasitas sentra produksi (irigasi, alsitan, dll), sentra industri pengolahan (bangunan, permesinan, energi alternatif, dll.), pasca panen (bangunan, permesinan, cold-storage, pengolahan limbah, dll.), dan peningkatan daya Tarik Destinasi wisata (bangunan, sarana pendukung, area pertunjukkan, dll.).

Terdiri dari sub-Program :

- 2.1 Pembangunan Obyek dan Destinasi Wisata Kawasan Perdesaan;
- 2.2 Pengembangan Sentra Budidaya Ikan Air Tawar Kawasan;
- 2.3 Pengembangan Sentra Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura Kawasan Perdesaan;
- 2.4 Pengembangan Sentra Sapi Potong Kawasan Perdesaan;
- 2.5 Revitalisasi Daya Tarik Wisata Seni-Budaya Kawasan Perdesaan;
- 2.6 Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi IKM Kawasan;

Terdapat 6 Sub-Program dan 14 Paket Kegiatan yang direncanakan selama periode 2017-2021, dengan nilai total 12,66 milyar Rupiah.

3) Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Sarana Bisnis atau Pusat Bisnis di Kawasan Ekonomi Perdesaan

Ruang lingkup kegiatan: Pembangunan baru, rehabilitasi atau peningkatan kapasitas sarana bisnis (pasar, toko, warung, bengkel, kantor Bumdesa, dll).

Terdiri dari sub-Program :

3.1 Pembangunan Sarana dan Pusat Bisnis Kawasan Perdesaan;

3.2 Pemberdayaan Bisnis dan Kapasitas Usaha UMKM Kawasan Perdesaan;

Terdapat 2 Sub-Program dan 7 Paket Kegiatan yang direncanakan selama periode 2017-2021, dengan nilai total 2,35 milyar Rupiah.

4) Penerapan Teknologi dan Inovasi Untuk Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing

Ruang lingkup kegiatan: Pemanfaatan teknologi dan inovasi yang dibutuhkan guna mencapai efisiensi biaya produksi, green production (ramah lingkungan), memenuhi standar produk tertentu, atau sertifikasi produk yang memungkinkan peningkatan daya saing dan akses pasar yang lebih luas.

Terdiri dari sub-Program :

4.1 Pemberdayaan, Penerapan Teknologi, dan Bantuan Peralatan Usaha UMKM Kawasan Perdesaan;

Terdapat 1 Sub-Program dan 5 Paket Kegiatan yang direncanakan selama periode 2017-2021, dengan nilai total 1,75 milyar Rupiah.

5) Pembangunan Suplay Energi Untuk Pemenuhan Domestik dan Industri

Ruang lingkup kegiatan: Pembangunan baru atau rehabilitasi infrastruktur energi baik berupa on-grid (koneksi ke listrik PLN dengan daya memadai) atau

pun off-grid (sumber listrik terbarukan mandiri/non-PLN seperti mini-hidro, biogas, plts, dll.). Terdiri dari Sub-Program :

- 5.1 Pembangunan Solar cell/Mikro hidro di Lokasi Wisata Kawasan;
- 5.2 Pengolahan Kotoran Sapi menjadi Pupuk Organik untuk Kawasan Perdesaan;

Terdapat 2 Sub-Program dan 2 Paket Kegiatan yang direncanakan selama periode 2017-2021, dengan nilai total 1,3 milyar Rupiah.

6) Pengembangan Pendidikan Kejuruan Untuk Meningkatkan Inovasi dan Kreativitas Lokal

Ruang lingkup kegiatan: Melaksanakan upaya pelatihan, studi banding dan magang, guna pengembangan /pemantapan kegiatan Bumdesa/ Usaha Bisnis Komunitas (UBK), juga tetap difokuskan pada kegiatan penggalian kearifan lokal, pendampingan usaha, konsultasi manajemen, peningkatan kapasitas, serta kerja sama multi pihak dalam rangka peningkatan inovasi dan kreativitas masyarakat. Terdiri dari Sub-Program :

- 6.1 KKN Tematik UPI di Kawasan Perdesaan;

Terdapat 1 Sub-Program dan 1 Paket Kegiatan yang direncanakan selama periode 2017-2021, dengan nilai total 0 Rupiah.

7) Pengembangan Kerjasama Antar Desa, Daerah, KPBU, BUM Antar Desa

Ruang lingkup kegiatan: Memfasilitasi kegiatan kerjasama antar desa, daerah, KPBU, dan BUM antar Desa, berupa pelatihan, pendampingan kelembagaan, dan pendirian dan pengurusan ijin badan usaha antar Desa. Terdiri dari sub-Program :

- 7.1 Peningkatan kapasitas SDM Desa (KOMPEPAR) Pengelola Pariwisata Kawasan Perdesaan;
- 7.2 Peningkatan kapasitas SDM Bumdes bersama;
- 7.3 Pembangunan Bank Sampah Bumdes Bersama;



Terdapat 3 Sub-Program dan 1 Paket Kegiatan yang direncanakan selama periode 2017-2021, dengan nilai total 2,20 milyar Rupiah.

8) Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro di Daerah

Ruang lingkup kegiatan: Memfasilitasi pendirian LKM (termasuk permodalan) di tingkat Desa atau Bum antar Desa sebagai motor penggerak ekonomi Kawasan, penyusunan SOP, dan pendampingan operasi sesuai ketentuan OJK.

Terdiri dari Sub-Program:

8.1 Fasilitasi Kemitraan Laku Pandai (CSR Bank BJB);

Terdapat 1 Sub-Program dan 1 Paket Kegiatan yang direncanakan selama periode 2017-2021, dengan nilai total 0 Rupiah.

9) Menerapkan TIK Untuk Memfasilitasi Perdagangan dan Pertukaran Informasi

Ruang lingkup kegiatan: Membantu penerapan TIK terkait perdagangan dan informasi pasar, berupa pelatihan operator TIK, pengadaan perangkat, pembuatan website/portal, interkoneksi data (online), dan jaminan akses internet. Terdiri dari Sub-Program :

9.1 Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi Obyek dan Destinasi Wisata Kawasan Perdesaan;

Terdapat 1 Sub-Program dan 1 Paket Kegiatan yang direncanakan selama periode 2017-2021, dengan nilai total 1,0 milyar Rupiah.

10) Program Peningkatan PTSP Di Daerah

Ruang lingkup kegiatan: Membantu penyediaan kemudahan dalam proses pengurusan perijinan secara terpadu, guna mendukung proses pembangunan dan pengembangan ekonomi Kawasan Perdesaan, misal pengurusan ijin ekspor langsung oleh pelaku usaha atau BUMDes. Terdiri dari Sub-Program :
(Belum Ada Rencana)



Terdapat 0 Sub-Program dan 0 Paket Kegiatan yang diusulkan selama periode 2017-2021, dengan nilai total 0 Rupiah.

Selengkapnya seluruh Sub-Program dan Paket kegiatan dapat dilihat dalam lampiran Matriks Indikasi Program Multi Sektor Pariwisata Alam dan Budaya Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan.

4.2 Indikator Capaian Kegiatan

Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik, yang akan dicapai setelah pelaksanaan program dan kegiatan dalam periode waktu tertentu. Target harus menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator sasaran. Penetapan target juga harus relevan dengan indikatorkinerjanya, logis dan berdasarkan baseline data yang jelas.

Output atau keluaran kegiatan pada hakekatnya merupakan wujud dari pelaksanaan suatu program, sehingga keluaran dari kegiatan tersebut seharusnya berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian sasaran dan outcome program.

1) Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Transportasi

- 1.1 Terlaksananya Rehabilitas dan Pembangunan Jalan Poros Kawasan Perdesaan, dengan outcome : Efisiensi biaya transportasi orang dan barang, khususnya wisatawan.
- 1.2 Terlaksananya Rehabilitasi dan Pembangunan Jalan Usaha Tani menuju objek wisata, dengan outcome : Konektivitas antar sentra produksi melalui jalan usaha tani akan mengurangi biaya transportasi.
- 1.3 Terlaksananya Penataan Bumi Perkemahan di Kawasan Wisata, dengan outcome : Meningkatnya wisatawan ke Bumi perkemahan dengan tersedianya sarana pendukung yang memadai.

- 1.4 Terlaksananya Peningkatan Jalan Dusun Kawasan Perdesaan, dengan outcome : Baiknya kondisi jalan dusun meningkatkan rasa aman dan nyaman wisatawan menuju destinasi wisata.
- 1.5 Terlaksananya Pembangunan sarana prasarana Air Minum, dengan outcome : Meningkatnya kapasitas pelayanan air bersih kawasan.
- 1.6 Terlaksananya Pembangunan sanitasi bertumpu Pada Masyarakat (SABERMAS), dengan outcome : Meningkatnya cakupan pelayanan SABERMAS Kawasan Perdesaan.

2) Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Sentra Produksi, Sentra Industri Pengolahan, Hasil Pertanian dan Perikanan, serta Destinasi Wisata

- 2.1 Terlaksananya Pembangunan Obyek dan Destinasi Wisata Kawasan Perdesaan, dengan outcome : Ketersediaan sarana dan fasilitas Pariwisata sesuai standar Kementerian Pariwisata akan mendorong wisatawan datang dan tinggal di kawasan lebih lama.
- 2.2 Terlaksananya Pengembangan Sentra Budidaya Ikan Air Tawar Kawasan, dengan outcome : Berkembangnya budidaya ikan air tawar guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendukung wisata kuliner.
- 2.3 Terlaksananya Pengembangan Sentra Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura Kawasan Perdesaan, dengan outcome: Meningkatnya produktivitas pertanian kawasan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi.
- 2.4 Terlaksananya Pengembangan Sentra Sapi Potong Kawasan Perdesaan, dengan outcome : Berkembangnya budidaya sapi potong guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendukung wisata kuliner.
- 2.5 Terlaksananya Revitalisasi Daya Tarik Wisata Seni-Budaya Kawasan Perdesaan, dengan outcome : Seni-budaya kawasan perdesaan (khas perbatasan Jabar-Jateng) dan arkeologi menjadi daya tarik wisata Kawasan Perdesaan.
- 2.6 Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi IKM Kawasan, dengan outcome : Meningkatnya kapasitas usaha IKM dengan optimalnya sarana dan prasarana Produksi.

3) Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Sarana Bisnis atau Pusat Bisnis di Kawasan Ekonomi Perdesaan

- 3.1 Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Pusat Bisnis Kawasan Perdesaan, dengan outcome : Meningkatnya daya saing kawasan untuk pemasaran produk unggulan dan menambah daya tarik wisata.
- 3.2 Terlaksananya Pemberdayaan Bisnis dan Kapasitas Usaha UMKM Kawasan Perdesaan, dengan outcome : Meningkatnya kapasitas usaha UMKM melalui pemberdayaan, dukungan saran dan permodalan.

4) Penerapan Teknologi dan Inovasi Untuk Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing

- 4.1 Terlaksananya Pemberdayaan, Penerapan Teknologi, dan Bantuan Peralatan Usaha UMKM Kawasan Perdesaan, dengan outcome : Meningkatnya kapasitas produksi dan daya saing produk UMKM.

5) Pembangunan Suplay Energi Untuk Pemenuhan Domestik dan Industri

- 5.1 Terlaksananya Pembangunan Solar cell/Mikro hidro di Lokasi Wisata Kawasan, dengan outcome : Solar Cell/Mikro Hidro dapat menyediakan energi listrik mandiri yang mendorong lebih banyak aktivitas jasa dan layanan di obyek wisata.
- 5.2 Terlaksananya Pengolahan Kotoran Sapi menjadi Pupuk Organik untuk Kawasan Perdesaan, dengan outcome : Optimalnya pemanfaatan kotoran dan urine sapi menjadi pupuk organik mengurangi biaya produksi.

6) Pengembangan Pendidikan Kejuruan Untuk Meningkatkan Inovasi dan Kreativitas Lokal

- 6.1 Terlaksananya KKN Tematik UPI di Kawasan Perdesaan, dengan outcome : KKN Tematik UPI dapat memberikan pendampingan dalam mengembangkan pariwisata kawasan, khususnya dibidang kepariwisataan, kuliner dan seni-budaya Kawasan.



7) Pengembangan Kerjasama Antar Desa, Daerah, KPBU, BUM Antar Desa

- 7.1 Terlaksananya Peningkatan kapasitas SDM Desa (KOMPEPAR) Pengelola Pariwisata Kawasan Perdesaan, dengan outcome : Meningkatnya pengetahuan dan skill kepariwisataan masyarakat untuk mengembangkan obyek dan destinasi wisata.
- 7.2 Terlaksananya Peningkatan kapasitas SDM Bumdes bersama, dengan outcome : Meningkatnya kapasitas SDM Bumdes bersama untuk pengembangan usaha kawasan.
- 7.3 Terlaksananya Pembangunan Bank Sampah Bumdes Bersama, dengan outcome : Berjalannya pengolahan sampah di obyek-obyek wisata melalui Bank Sampah dengan prinsip 3R belum berjalan

8) Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro di Daerah

- 8.1 Terlaksananya Fasilitasi Kemitraan Laku Pandai (CSR Bank BJB), dengan outcome : Tumbuhnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat kemitraan laku pandai guna mendukung usaha.

9) Menerapkan TIK Untuk Memfasilitasi Perdagangan dan Pertukaran Informasi

- 9.1 Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi Obyek dan Destinasi Wisata Kawasan Perdesaan, dengan outcome : Terintegrasinya media promosi dan informasi komoditas kopi kawasan melalui website dan media online.

10) Program Peningkatan PTSP Di Daerah

(Belum Ada Rencana)

4.3 Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan arahan UU No. 6/2014 tentang Desa, yang mengamanatkan bahwa pembangunan kawasan perdesaan dilakukan dalam rangka mempercepat dan

meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat kawasan perdesaan.

Pembiayaan pembangunan di kawasan perdesaan terdiri dari tiga sumber pendanaan, yaitu: dana dari pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Dana dari pemerintah bersumber dari Dana APBN berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, Dana Tugas Pembantuan, Dana Dekonsentrasi, laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN); serta Dana APBD. Dana dari pihak swasta diperoleh dengan pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. 5/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dan disempurnakan melalui perubahan terakhir Peraturan Menteri BUMN No. 8/2013 serta Dana APBD. Dana dari pihak swasta diperoleh dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diatur dalam UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).

Besarnya anggaran dalam realisasi program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan dari berbagai sumber pendanaan tersebut harus diimbangi dengan pelaksanaan konsolidasi dan harmonisasi anggaran pembangunan dari berbagai sumber (APBN, APBD dan Swasta). Keberadaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa harus mampu mensinergikan dan mengharmonisasikan seluruh program dan kegiatan melalui dokumen perencanaan pembangunan agar realisasi program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan dapat menjadi fokus bersama dan dikelola secara terpadu.

Berdasarkan rekapitulasi Matriks Indikasi Program Multi Sektor Kawasan Perdesaan Pariwisata Alam dan Budaya, Kabupaten Kuningan, untuk periode 2017-2021 terdiri dari **9 Program, 23 Sub-Program dan 52 Kegiatan**, dengan total rencana anggaran adalah sebesar Rp. **128.380.000.000,00,-**. Komposisi pendanaan rencana anggaran pembangunan RPKP, adalah sebagai berikut :



1. APBN (K/L) : 28.050.000.000,00 (21,8%),
2. APBD Provinsi : 95.120.000.000,00 (74,1%),
3. APBD Kabupaten : 4.800.000.000,00 (3,7%) dan
4. APBDes : 410.000.000,00 (0,3%).

Detail perencanaan program kegiatan RPKP Pariwisata Alam dan Budaya, Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan dapat dilihat pada Matriks Multi sektor RPKP periode 2017-2021 terlampir.

LAMPIRAN.

Rincian Matriks Indikasi Program Multi Sektor RPKP Pariwisata Alam dan Budaya Kecamatan Ciwaru

NO	KEBUTUHAN INTERVENSI (*Berdasarkan Masterplan Kawasan)	Prog/Keg yang Sudah Dilaksanakan	Volume yang Sudah Dilaksanakan	Prog/Keg yang Akan Dilaksanakan	Volume					Alokasi Dana (Rp.)	Sumber Anggaran	Instansi Pelaksana
					Tahun ke-1 (2017)	Tahun ke-2 (2018)	Tahun ke-3 (2019)	Tahun ke-4 (2020)	Tahun ke-5 (2021)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	PEMBANGUNAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI, SDA, DAN CIPTA KARYA									107.170.000.000,00		
1	Rehabilitasi dan Pembangunan Jalan Poros Kawasan Perdesaan	Rehabilitasi Jalan Sumberjaya - Citundun Kecamatan Ciwaru 2 km	4,1 km x 4 m	1 Lanjutan Rehabilitasi Jalan Sumberjaya - Citundun Kecamatan Ciwaru sebagai Poros Kawasan Perdesaan	lanjutan 2,1 km					2.000.000.000,00	APBN	Dir. Sarpras Kawasan Perdesaan, Ditjen PKP, KDPDPT
				2 Peningkatan Jalan Dusun Karangsari - Cirahayu sebagai Poros Kawasan Perdesaan	2,5 km					2.500.000.000,00	APBN	Dir. Sarpras Kawasan Perdesaan, Ditjen PKP, KDPDPT
			4 km x 2m	3 Pemeliharaan Jalan Linggajaya - Sagaranten		2 km	2 km			1.620.000.000,00	APBD PROV	Dinas Bina Marga
			2 km x 4 m	4 Peningkatan Kualitas Jalan Subang - Ciwaru		2 km				2.800.000.000,00	APBD PROV	Dinas Bina Marga
			350 m x 3 m	5 Pembangunan Jalan Ciseureuh - Cimanggang Desa Ciwaru			350 m x 3 m			350.000.000,00	APBD	Dinas Bina Marga
			1 km x 3 m	6 Peningkatan Jalan Sumberjaya - Balandongan Desa Sumberjaya sebagai Akses Pariwisata Kawasan				1 km x 3 m		1.000.000.000,00	APBN	Dir. Sarpras Kawasan Perdesaan, Ditjen PKP, KDPDPT
			25 m x 2 m	7 Pembangunan/Rehab Jembatan Ciseureuh Desa Ciwaru		25 m x 2 m				1.650.000.000,00	APBD prov	Dinas Bina Marga
2	Rehabilitasi dan Pembangunan Jalan Usaha Tani menuju objek wisata		1,5 km x 2 m	8 Jalan Usaha Tani menuju objek wisata Curug Bungawari Desa Sagaranten	1,5 km					1.000.000.000,00	APBN	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian
			2,5 km x 1,5 m	9 Jalan Usaha Tani menuju Objek Wisata Curug Windujati Desa Sumberjaya		2,5 km				2.000.000.000,00	APBN	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian
			500 m x 1,5 m	10 Jalan Usaha Tani menuju Objek Wisata Air Panas Balandongan	500 m					500.000.000,00	APBN	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian
3	Penataan Bumi Perkemahan di Kawasan Wisata		1000 m2	11 Penataan Bumi Perkemahan Ciwaru	1000 m2					1.000.000.000,00	APBN	Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR
4	Peningkatan Jalan Dusun Kawasan Perdesaan		2,7 km x 2,5 m	12 Peningkatan Jalan Dusun Pawasa Desa Sumberjaya sebagai Akses Pariwisata Kawasan		2,7 km x 2,5 m				2.500.000.000,00	APBN	Dir. Sarpras Kawasan Perdesaan, Ditjen PKP, KDPDPT
			1,8 km x 2,5 m	13 Peningkatan Jalan Dusun Kambangan Desa Sumberjaya sebagai Akses Pariwisata Kawasan			1,8 km x 2,5 m			1.800.000.000,00	APBN	Dir. Sarpras Kawasan Perdesaan, Ditjen PKP, KDPDPT
			1 km x 1,5 m	14 Pembangunan Jalan Dusun Kambangan menuju Blok Nagog sebagai Akses Pariwisata Kawasan					1 km x 1,5 m	1.000.000.000,00	APBN	Dir. Sarpras Kawasan Perdesaan, Ditjen PKP, KDPDPT
		Pengecoran (Rabat Beton) Jalan Desa Sumberjaya Kecamatan Ciwaru	150 m x 2 m	15						150.000.000,00	APBD	Dinas Bina Marga
5	Pembangunan sarana prasarana Air Minum		1 paket	16 Desa Citundun, Sagaranten, Sumberjaya, Ciwaru	1 paket					11.300.000.000,00	APBD Prov	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
6	Pembangunan sanitasi bertumpu Pada Masyarakat (SABERMAS)		1 paket	17 Desa Citundun, Sagaranten, Sumberjaya	1 paket					74.000.000.000,00	APBD Prov	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang



**Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan
Kabupaten Kuningan**

Laporan RPKP

NO	KEBUTUHAN INTERVENSI (*Berdasarkan Masterplan Kawasan)	Prog/Keg yang Sudah Dilaksanakan	Volume yang Sudah Dilaksanakan	Prog/Keg yang Akan Dilaksanakan	Volume					Alokasi Dana (Rp.)	Sumber Anggaran	Instansi Pelaksana
					Tahun ke-1 (2017)	Tahun ke-2 (2018)	Tahun ke-3 (2019)	Tahun ke-4 (2020)	Tahun ke-5 (2021)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
II	PEMBANGUNAN DAN/ATAU REHABILITASI SENTRA PRODUKSI, SENTRA INDUSTRI PENGOLAHAN, HASIL PERTANIAN DAN PERIKANAN, SERTA DESTINASI WISATA									12.660.000.000,00		
1	Pembangunan Obyek dan Destinasi Wisata Kawasan Perdesaan		9 jenis	18 - Pembangunan kawasan Wisata Desa Citundun	Gapura & Loket, Lahan Parkir, TPT, Jalan Setapak Batu Templek, Penataan Lahan (zonasi), Toilet, Mushola, Pengadaan Air Bersih, Ralling	Gazebo, Instalasi Listrik, Tempat Duduk, Penangkal Petir, Pembuatan Taman, Papan Petunjuk	Penataan Lahan Agro, Pengadaan Pohon, Jalan Setapak ke Curug, Ralling ke Curug, Gazebo Curug	Tenda Kemping, Sarana Outbond, Gudang, Tempat Ganti Pakaian, Kantor Pengelola	Saluran Air, Pembuatan Tribun	3.000.000.000,00	APBN	Dir. Pengembangan SDA Kawasan Perdesaan, Ditjen PKP, KDPDPT
			6 jenis	19 - Pembangunan kawasan Wisata Desa Sumberjaya	Gapura & Loket Karcis, Jalan Setapak, Toilet, Mushola, Lahan Parkir, Air Bersih	Tempat Duduk, Pembuatan Taman, Papan Petunjuk, Taman Kios Jajan, Pengadaan Pohon	Penataan di Lokasi Air Panas, Jalan Setapak ke Curug, Kantor Pengelola, Tempat Ganti pakaian, Listrik	Gudang, Saluran Air		2.000.000.000,00	APBN	Dir. Pengembangan SDA Kawasan Perdesaan, Ditjen PKP, KDPDPT
				20 Penataan Obyek Wisata Curug Bungawari desa Sagaranten	Gapura & Loket Karcis, Jalan Setapak, Toilet, Mushola, Lahan Parkir, Air Bersih	Taman, Tempat Duduk, Pengadaan Listrik, Gazebo, Kios Jajan	Kantor Pengelola, Gudang			1.500.000.000,00	APBN	Dir. Pengembangan SDA Kawasan Perdesaan, Ditjen PKP, KDPDPT
			1 paket	21 Pembangunan Kawasan wisata Curugwinujati dan air panas Blandongan Desa Sumberjaya	Penataan Parkir, TPT, Paving Blok, Pagar, Wc dan instalasi air			1 paket		1.500.000.000,00	APBN	Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Kementerian Pariwisata
2	Pengembangan Sentra Budidaya Ikan Air Tawar Kawasan			22 Sentra Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar	1 paket (APBN - KEMANTAN)	4 paket (APBD prov)	4 paket (APBD prov)	4 paket (APBD prov)	4 paket (APBD prov)	1.000.000.000,00	APBN & APBD Prov	Ditjen Perikanan Budidaya, Kementerian KKP
3	Pengembangan Sentra Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura Kawasan Perdesaan		25 ha	23 Pengembangan Padi Organik Desa Sumberjaya	5 ha	10 ha	10 ha			50.000.000,00	APBD	Dinas Pertanian
			3 ha	24 Pengembangan Tanaman Singkong			1 ha	1 ha	1 ha	300.000.000,00	APBD	Dinas Pertanian
			100 ha	25 Pengembangan Kawasan Rambutan Walahar	50 ha	50 ha				650.000.000,00	APBD Prov	Ditjen Hortikultura, Kementerian Pertanian
4	Pengembangan Sentra Sapi Potong Kawasan Perdesaan		1 paket	26 Pengembangan Kawasan Sapi Potong Desa Ciwaru		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1.000.000.000,00	APBN	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian
5	Revitalisasi Daya Tarik Wisata Seni-Budaya Kawasan Perdesaan		1 unit	27 Pembangunan sanggar seni Desa Citundun	Bangunan Gedung					500.000.000,00	APBD	DISPARBUD
			1 unit	28 Pengadaan Sarpras Kesenian Desa Citundun		1 paket				200.000.000,00	APBD Prov	DISPARBUD
			1 paket	29 Pelatihan Seni Sunda Desa Citundun		1 paket				10.000.000,00	APBDes	Pemdes
6	Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi IKM Kawasan		1 paket	30 Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi IKM		1 paket				800.000.000,00	APBD Prov	Disperindag
		Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) Wilayah Perbatasan	30 Orang untuk Pelatihan 6 Kelompok untuk Bantuan Peralatan	31	1 paket					150.000.000,00	APBD	Disperindag



**Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan
Kabupaten Kuningan**

Laporan RPKP

NO	KEBUTUHAN INTERVENSI (*Berdasarkan Masterplan Kawasan)	Prog/Keg yang Sudah Dilaksanakan	Volume yang Sudah Dilaksanakan	Prog/Keg yang Akan Dilaksanakan	Volume					Alokasi Dana (Rp.)	Sumber Anggaran	Instansi Pelaksana
					Tahun ke-1 (2017)	Tahun ke-2 (2018)	Tahun ke-3 (2019)	Tahun ke-4 (2020)	Tahun ke-5 (2021)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
III PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN SARANA BISNIS ATAU PUSAT BISNIS DI KAWASAN EKONOMI PERDESAAN										2.350.000.000,00		
1	Pembangunan Sarana dan Pusat Bisnis Kawasan Perdesaan		1 unit	32 Pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa dan Kios Desa Sumberjaya	1 unit					200.000.000,00	APBDes	Pemdes
			1 unit	33 Pembangunan Desa Mart sebagai Penyedia Kebutuhan Logistik Kawasan	1 unit					450.000.000,00	APBN	Dir. Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan, Ditjen PKP, KDPDTT
			1 unit	34 Pembangunan Rest Area Destinasi Wisata Kawasan Perdesaan Di Desa Ciwaru			1 unit			500.000.000,00	APBD	Dinas TRCK
2	Pemberdayaan Bisnis dan Kapasitas Usaha UMKM Kawasan Perdesaan		2 paket	35 Pemberdayaan Usaha Masyarakat Daerah Perbatasan	1 paket	1 paket				250.000.000,00	APBD	Dinas KUKM
			2 paket	36 Penguatan UMKM di Tiga Kecamatan IPM Rendah	1 paket	1 paket				200.000.000,00	APBD	Dinas KUKM
			2 paket	37 Penguatan Kelembagaan BUMDES	1 paket	1 paket				350.000.000,00	APBD	BPMD
			2 paket	38 Penguatan Permodalan Sarana produksi	1 paket	1 paket				400.000.000,00	APBD	BPMD
IV PENERAPAN TEKNOLOGI DAN INOVASI UNTUK MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING										1.750.000.000,00		
1	Pemberdayaan, Penerapan Teknologi, dan Bantuan Peralatan Usaha UMKM Kawasan Perdesaan		1 paket	39 Bantuan peralatan bagi perajin makanan khas Desa Sagaranten		1 paket				500.000.000,00	APBD Prov	Dinas KUKM
			1 paket	40 Bantuan peralatan jahit dan Sablon		1 paket				500.000.000,00	APBD Prov	Dinas KUKM
				41 Pelatihan dan pengembangan Industri Olahan Singkong		1 paket				200.000.000,00	APBDes	Pemdes
			2 paket	42 Pengembangan Teknologi Produksi Gula Merah		1 paket				300.000.000,00	APBD Prov	Disperindag
			2 paket	43 Pengembangan Desain Kemasan	1 paket	1 paket				250.000.000,00	APBD	Disperindag
V PEMBANGUNAN SUPLAY ENERGI UNTUK PEMENUHAN DOMESTIK DAN INDUSTRI										1.300.000.000,00		
1	Pembangunan Solar cell/Mikro hidro di Lokasi Wisata Kawasan		1 paket	44 Pembangunan Solar cell/Mikro hidro		1 paket				1.000.000.000,00	APBN	Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral
2	Pengolahan Kotoran Sapi menjadi Pupuk Organik untuk Kawasan Perdesaan		1 paket	45 Pengolahan Kotoran Sapi menjadi Pupuk Organik			1 paket	1 paket	1 paket	300.000.000,00	APBN	Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral
VI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEJURUAN UNTUK MENINGKATKAN INOVASI DAN KREATIVITAS LOKAL												
1	KKN Tematik UPI di Kawasan Perdesaan			46 Pemberdayaan masyarakat dan usaha Kawasan Perdesaan melalui KKN Tematik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)							Lembaga Pengabdian Masyarakat UPI	Dinas Pendidikan dan BPMPD Kabupaten



**Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan
Kabupaten Kuningan**

Laporan RPKP

NO	KEBUTUHAN INTERVENSI (*Berdasarkan Masterplan Kawasan)	Prog/Keg yang Sudah Dilaksanakan	Volume yang Sudah Dilaksanakan	Prog/Keg yang Akan Dilaksanakan	Volume					Alokasi Dana (Rp.)	Sumber Anggaran	Instansi Pelaksana
					Tahun ke-1 (2017)	Tahun ke-2 (2018)	Tahun ke-3 (2019)	Tahun ke-4 (2020)	Tahun ke-5 (2021)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
VII PENGEMBANGAN KERJASAMA ANTAR DESA, DAERAH, KPS, BUM ANTAR DESA										2.200.000.000,00		
1	Peningkatan kapasitas SDM Desa (KOMPEPAR) Pengelola Pariwisata Kawasan Perdesaan		25 Kelompok /Desa	47 Peningkatan kapasitas SDM Desa Pengelola Pariwisata/Kompe par/BUMDES Kawasan Perdesaan	5 Kelompok /Desa	5 Kelompok /Desa	5 Kelompok /Desa	5 Kelompok /Desa	5 Kelompok /Desa	1.250.000.000,00	APBD	DISPARBUD
2	Peningkatan kapasitas SDM Bumdes bersama		40 org	48 Peningkatan kapasitas SDM Bumdes bersama		40 org				150.000.000,00	APBD	BPMD
3	Pembangunan Bank Sampah Bumdes Bersama		1 unit	49 Pembangunan Bank Sampah Bumdes Bersama	1 unit					800.000.000,00	APBN	Dir. Pengembangan SDA Kawasan Perdesaan, Ditjen PKP, KDPDTT
VIII PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DI DAERAH										-		
1	Fasilitasi Kemitraan Laku Pandai (CSR Bank BJB)		1 lokasi	50 Implementasi kemitraan Laku-Pandai	1 lokasi					-	CSR Bank BJB	BPMD
IX MENERAPKAN TIK UNTUK MEMFASILITASI PERDAGANGAN DAN PERTUKARAN INFORMASI										1.000.000.000,00		
1	Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi Obyek dan Destinasi Wisata Kawasan Perdesaan		4 paket	51 Jejaring utk Publikasi dan Promosi online	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	1.000.000.000,00	APBN	DISPARBUD
			1 paket	52 Website Bumdes Online	1 paket					100.000.000,00	APBD	BPMD
X PENINGKATAN PTSP DI DAERAH												
				JUMLAH	96.070.000.000	18.480.000.000	7.180.000.000	3.950.000.000	2.700.000.000	128.380.000.000,00		
		PROPORSI SUMBER PEMBIYAAAN		APBN	8.500.000.000	9.050.000.000	4.950.000.000	3.400.000.000	2.150.000.000	28.050.000.000,00	21,8%	
				APBD Provinsi	85.625.000.000	8.085.000.000	1.010.000.000	200.000.000	200.000.000	95.120.000.000,00	74,1%	
				APBD Kabupaten	1.735.000.000	1.145.000.000	1.220.000.000	350.000.000	350.000.000	4.800.000.000,00	3,7%	
				APBDES	210.000.000	200.000.000	-	-	-	410.000.000,00	0,3%	



LAMPIRAN-LAMPIRAN

